

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Apeldoorn, Van, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Is, Muhammad Sadi, 2016, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan III*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Margono, Suyud, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy Omar Sharif Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011, *Competition Assessment Toolkit Guidance*, OECD, Paris.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Usman, Rachmad, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## B. Artikel Jurnal

Ahmad, Sufmi Dasco. "Rule of Reason and Per Se Illegal Approaches in Enforcing the Business Competition Law." *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2017.

Anggraini, Anna Maria Tri Ahmad Sabirin, dan Yoel Nixon A. Rumahorbo. "The Form and Pattern of Business Actors Requirements in Exclusive Dealing: A Rule of Reason Approach", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023.

Ayokanmbi, Fola Michael. "The Impact of Big Data Analytics on Decision-Making." *International Journal of Management, IT & Engineering*, Vol. 11, No. 4, 2021.

Bich, Ngoc Nguyen Thi dan Phan Quoc Nyuyen. "Inclusive and Implementable Legal Rules for E-Commerce: A Comparative Study of Indonesia and Vietnam." *Indonesia Law Review*, Vol. 10, No. 3, 2020.

Busalim, Abdelsalam H. Dan Abdul Razak Che Hussin. "Understanding social commerce: A systematic literature review and directions for further research." *International Journal of Information Management*, Vol. 36, 2016.

- Daulay, Ulan Dari. “The Impact of Factory-to-Consumer Business Model on MSMEs in Indonesia: An Islamic Business Ethics Perspective on Temu Application.” *Perbanas Journal of Islamic Economics & Business*, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Deutscher, Elias. “Reshaping Digital Competition: The New Platform Regulations and the Future of Modern Antitrust.” *The Antitrust Bulletin*, Vol. 67, No. 2, 2022.
- Effendi, Basri. “Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Hotana, Melisa Setiawan. “Industri E-Commerce dalam Menciptakan Pasar yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Hovenkamp, Herbert. “Antitrust and Platform Monopoly.” *Yale Law Journal*, Vol. 130, No. 8, 2021.
- Kim, Dohoon. “Under what conditions will social commerce business models survive?” *Electronic Commerce Research and Application*, Vol. 12, 2013.
- Mantili, Rai Hazar Kusmayanti, Anita Afriana. “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam rangka Menciptakan Kepastian Hukum.” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2016.

- Muna, Kholifatul dan Budi Santoso. “Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2024.
- Rahmadhani, Diana Aviq, *et al.* “Analisis Pelarangan Operasional TikTok Shop dalam Langkah Pengambilan Keputusan Melalui Perspektif *Problem Tree Analysis*.” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Reyhan, Ammar, *et al.* “Dampak TikTok Shop Terhadap Pedagang Pasar Tradisional atau UMKM di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 2, No. 4, 2024.
- Salop, Steven C. “Dominant Digital Platform: Is Antitrust up to the Task?.” *Yale Law Journal Forum*, Vol. 130, 2021.
- Syuhada, Ahmad Anshorimuslim dan Windy Gambett. “Online Marketplace for Indonesian Micro Small and Medium Enterprises based on Social Media.” *Procedia Technology*, Vol. 11, 2013.
- Tan, Yizhi. “Market Entry Strategies of Temu and Shein: A Comparative Analysis.” 2024.
- Thalib, Emmy Febriani dan Ni Putu Suci Meinarni. “Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Keadilan Ius*, Vol. 7, No. 2, 2019.

### **C. Hasil Penelitian/ Tugas Akhir**

- Pratama, Kristianus Jimy, 2022, *Penguatan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Mekanisme Pengawasan Perilaku Jual Rugi*

*yang Dilakukan oleh Foreign Electronic Commerce*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Saputra, Adam Hasan, 2023, *Kewenangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menetapkan Sanksi Denda atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor: 07/KPPU-I/2020)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sitohang, Averin, 2022, *Analisis Yuridis terhadap Perubahan Pengaturan Sanksi dalam Undang-Undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Aspek Keadilan dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Wishnumutri, Anugrah, 2023, *Personal Data Protection in Abuse of Dominant Position: An Analysis of the German Federal Cartel Office Decision No. B6-22/16 of 2019 (Bundeskartellamt v. Facebook)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

#### **D. Internet**

Admin. "Ini 5 Sanksi yang Menanti TikTok Shop Apabila Masih Membuka Layanan Penjualan." *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/ini-5->

sanksi-yang-menanti-tiktok-shop-apabila-masih-membuka-layanan-penjualan-138657. Diakses pada 9 Oktober 2025.

Admin. “Shopping Live Potensi Cuan Besar, Inilah Sejumlah Faktanya!”  
*Ginee.com*. <https://ginee.com/id/insights/shopping-live/>. Diakses pada 11 Oktober 2025.

Admin. “Terbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, Mendag Zulkifli Hasan: Pemerintah Bangun Ekosistem Perdagangan Digital Adil dan Sehat.”  
*Kementerian Komunikasi dan Digital*.  
<https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/terbitkan-permendag-nomor-31-tahun-2023-mendag-zulkifli-hasan-pemerintah-bangun-ekosistem-perdagangan-digital-adil-dan-sehat>. Diakses pada 9 Oktober 2025.

Annur, Cindy Mutia. “Sebelum Tutup di Indonesia, Pangsa Pasar TikTok Shop Diprediksi Melesat pada 2023.” *Katadata*.  
<https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/4abcca668fab154/sebelum-tutup-di-indonesia-pangsa-pasar-tiktok-shop-diprediksi-melesat-pada-2023>. Diakses pada 26 Juni 2025.

Dian, Rusti. “Kominfo Resmi Blokir Aplikasi TEMU karena Dianggap Mengancam UMKM.” *Narasi*, [https://narasi.tv/read/narasi-daily/kominfo-resmi-blokir-aplikasi-temu?utm\\_source=copy\\_link&utm\\_medium=share](https://narasi.tv/read/narasi-daily/kominfo-resmi-blokir-aplikasi-temu?utm_source=copy_link&utm_medium=share). Diakses pada 10 Maret 2025.

Liang, Annabelle. “Fortnite back on US Apple App Store after Ban Lifted.”

*BBC*. <https://www.bbc.com/news/articles/c0711mrl470o>. Diakses pada 10 Oktober 2025

Nurhapy, Mikhaangelo Fabialdi dan Wahyunanda Kusuma Pertiwi. “TikTok Shop Resmi Ditutup, Menu Hilang dan Tak Ada Lagi Keranjang Kuning.”

*Kompas.com*,

<https://tekno.kompas.com/read/2023/10/04/17591707/tiktok-shop-resmi-ditutup-menu-hilang-dan-tak-ada-lagi-keranjang-kuning?>. Diakses pada 8 Maret 2025.

Riyanto, Galuh Putri dan Wahyunanda Kusuma Pertiwi. “Indonesia Penyumbang Kedua Transaksi di TikTok Shop 2024.” *Kompas.com*,

<https://tekno.kompas.com/read/2025/01/08/19010027/indonesia-penyumbang-terbesar-kedua-transaksi-di-tiktok-shop-2024?>. Diakses pada 26 Juni 2025.

Setyowati, Desy. “Perbandingan Transaksi Temu, Shopee, TikTok Shop Tokopedia hingga Lazada.” *Katadata.co.id*.

<https://katadata.co.id/digital/e-commerce/670cf15b0904c/perbandingan-transaksi-temu-shopee-tiktok-shop-tokopedia-hingga-lazada>. Diakses pada 10 Oktober 2025.

Suhartanto, Crysania. “Tiktok Shop Dilarang, 13 Juta UMKM dan Kreator Terdampak.” *Bisnis.com*,

[https://teknologi.bisnis.com/read/20230926/266/1698597/Tiktok\\_shop-dilarang-13-juta-umkm-dan-kreator-terdampak](https://teknologi.bisnis.com/read/20230926/266/1698597/Tiktok_shop-dilarang-13-juta-umkm-dan-kreator-terdampak). Diakses pada 19 Juli 2025.

Wahyuni, Willa. “Meningkatkan Daya Saing Nasional melalui Kebijakan Persaingan Usaha.” *Hukumonline.com*.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/meningkatkan-daya-saing-nasional-melalui-kebijakan-persaingan-usaha-lt67c53167edcdb/>. Diakses pada 9 Oktober 2025.

### **E. Peraturan Perundang-undangan**

*Clayton Antitrust Act of 1914.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 763).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan Terhadap

Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 295).

*Sherman Antitrust Act of 1890.*

## **F. Putusan Pengadilan**

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf a dan b, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penerapan Google Play Billing System.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2002 tentang Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan PT Camila Internusa Film, PT Satria Perkasa Esthetika Film, dan PT Nusantara Sejahtera Raya.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktek Diskriminasi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Telekomunikasi Seluler terhadap Netflix terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider.

United States District Court Northern District of California Case No. 4:20-cv-05640-YGR (Epic Games, Inc. v. Apple, Inc.).